

- Berdialog dengan warga/ masyarakat di Desa Sukamulya dan Sukakerta
- Telah dilakukan koordinasi dengan petugas keamanan (TNI dan POLRI) setempat untuk memperbantuan perugas pengamanan dalam pengukuran lahan di lokasi kegiatan dengan dikoordinasikan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang telah mendapat alokasi biaya pada anggaran perubahan Tahun 2014, namun hingga akhir Tahun 2014, belum berhasil secara keseluruhan

**3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)**

- a. Permasalahan: Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat, pembuatan rencana awal Buku Panduan Transportasi PON XIX tidak dilaksanakan Tahun 2014 terkait belum ada data dari bidang lain dan untuk Jasa Konsultansi Pembuatan Buku Panduan Transportasi PON XIX tidak cukup waktu untuk dilaksanakan Tahun 2014.
- b. Solusi: Jasa Konsultansi Pembuatan Buku Panduan Transportasi PON XIX pad Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat diusulkan kembali Tahun 2015;
- c. Permasalahan: Kegiatan Pengembangan Fasilitas LLJ di Jawa Barat pada pengadaan dan pemasangan CCTV, gagal lelang dan tidak cukup waktu untuklelang ulang, Pengadaan & Pemasangan PJU Konvensional dengan LED Wilayah Pembangunan I mengalami gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk lelang ulang, Pengadaan & Pemasangan PJU Konvensional dengan LED Wilayah Pembangunan II mengalami gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk lelang ulang, Pengadaan & Pemasangan PJU Konvensional dengan LED Wilayah Pembangunan III mengalami gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk lelang ulang, Pengadaan & Pemasangan PJU Konvensional dengan LED Wilayah Pembangunan IV Bagian tengah mengalami gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk lelang ulang, Pengadaan & Pemasangan PJU Konvensional dengan LED Wilayah Pembangunan IV Bagian Timur mengalami gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk lelang ulang;

- d. Solusi : Pada Kegiatan Pengembangan Fasilitas LLJ di Jawa Barat untuk Pengadaan dan pemasangan CCTV serta Pengadaan & Pemasangan PJU Konvensional dengan LED Wilayah Pembangunan I diusulkan kemabali pada Tahun 2015;

**4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**

- a. Permasalahan: Kegiatan Operasional Bus Sekolah adalah pengadaan kendaraan untuk bus sekolah baru akan terlaksana pada akhir Tahun, sehingga kegiatan operasional bus sekolah belum dapat dilaksanakan
- b. Solusi: Kegiatan Operasional Bus Sekolah adalah Kegiatan ini telah diusulkan pada TA. 2015.

**5. Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas**

- a. Permasalahan: Dalam kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Sarana/Prasarana Perhubungan adalah :
- Masih tingginya tindak pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku (Over load, Laik jalan, Cara muat dan Dimensi, kelas jalan), penyalahgunaan izin trayek serta pelanggaran administrasi para awak kendaraan SIM, STNK, Buku Uji.
  - Banyaknya lokasi izin galian C (pasir, tanah, batu) yang penggunaan kendaraannya di luar ketentuan dan tidak terpantau secara optimal baik di JT maupun oleh Keg OPGAB dan kurangnya efek jera terhadap tindakan administrasi dan denda tilang yang diberikan;
  - Belum adanya aturan sistem angkutan barang dan saat ini berdasarkan pada kesepakatan dua belah pihak (pengguna dan penyedia) dan belum adanya sistem logistik angkutan barang, sehingga melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan truk masih dominan;
  - Rapat koordinasi Bidang Perhubungan antar Provinsi anggota MPU dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (di Semarang dan Solo) serta oleh Provinsi DI Yogyakarta, sehingga alokasi anggaran yang tersedia tidak digunakan;
  - Pelaksanaan Operasi Gabungan bersama unsur TNI/POLRI bersamaan dengan kegiatan pengamanan pelantikan legislatif dan presiden,

- Pengamanan Operasi Ketupat, Operasi Lilin dan Tahun Baru 2015, sehingga biaya yang tersedia pada Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Sarana/Prasarana Perhubungan tidak terealisasi;
- Dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yang di dalamnya mengatur mengenai kewenangan dan urusan, termasuk Jembatan Timbang, sehingga sub kegiatan Kajian Yuridis Pelaksanaan Penimbangan di Jembatan Timbang pada kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Sarana/Prasarana Perhubungan tidak perlu dilaksanakan
  - b. Solusi: Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Sarana/Prasarana Perhubungan, Koordinasi lintas sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jalur Logistik adanya ketentuan mengenai tarif/ongkos angkutan barang dan adanya kesamaan bentuk implementasi terhadap peraturan yang berlaku serta pengembangan Moda lain ( KA, dan melalui pelabuhan laut).
  - c. Permasalahan : Kegiatan Pengadaan Fasilitas E-enforcement di Jembatan Timbang Gentong belum optimalnya pengoperasian dikarenakan, server masih terpusat di Kemeterian dan up date data oleh PKB Kab/Kota masih terkendala pemeliharaan dan SDM;
  - d. Solusi : Kegiatan Pengadaan Fasilitas E-enforcement di Jembatan Timbang Gentong, Peningkatan koordinasi, pemenuhan SDM (Operator) serta pemeliharaan Internet di Kab/Kota dan harus dibuat MoU;
  - e. Permasalahan : Kegiatan Pembinaan Operasional Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat adalah Penyusunan Pergub SPM Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum baru pada tahap Draft (tidak ditindaklanjuti menjadi PerGub), karena Terbitnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah Perhubungan Urusan Wajib tetapi Bukan Pelayanan Dasar sehingga Perda No. 3 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan harus direvisi dan penyusunan SPM ditunda.
  - f. Solusi : Kegiatan Pembinaan Operasional Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat Penyusunan Draft penyusunan SPM Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum, karena menunggu revisi Perda No. 3 tahun 2011 dan

Penyerapan tidak sepenuhnya dilakukan karena efektifitas atau pelaksanaan kegiatan optimal dilaksanakan (mamin, perjalanan dinas dan efisiensi anggaran pihak ketiga)

**6. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan bermotor**

Permasalahan : persyaratan administrasi untuk persyaratan dikeluarkan pembayaran Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 Untuk Proses Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Penilaian oleh pihak konsultan sudah dilaksanakan dan kekuarangan Mayor dan Minor sudah terpenuhi, namun sampai dengan tgl 31 Desember 2014 pihak Surpelence PT Indah Karya tidak melengkapi;

Solusi : Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 Untuk Proses Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor Untuk dikeluarkannya Sertifikat Registrasi ISO 9001 : 2008 dianggarkan di tahun 2015

**7. Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah**

**a. Permasalahan**

- Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Perda No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dilakukan dalam rentang waktu yang jauh dan pada masa transisi pemerintah;
- Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah tanggal 2 Oktober 2014, maka sesuai amanat Undang-Undang tersebut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nommor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga peraturan perundangan terkait perlu disesuaikan, termasuk Perda No. 3 Tahun 2011;
- Banyak peraturan pelaksanaan (Juknis) Perda No.3 tahun 2011 untuk penyusunannya diperlukan terlebih dahulu kajian/penelitian.

**b. Solusi**

Perlu dilaksanakan penyesuaian Perda No.3 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Perhubungan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan semua produk hukum yang terkait (Undang-Undang Teknis, Tupoksi, Organisasi Dll)

**8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

**9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Permasalahan : Kegiatan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Bandar Udara di Jawa Barat, Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang tidak dapat diprediksi terutama untuk di bandara Nusawiru (Kapasitas 6.000 KVA sehingga anggaran tidak memadai.

Solusi : Penambahan anggaran pada anggaran perubahan tahun 2015

**10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

**11. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**

**a. Permasalahan**

- (a) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara di Jawa Barat, Pemeliharaan sarana dan prasarana di bandara Nusawiru belum optimal karena luas lahan sekitar 70 Ha serta peralatan penerbangan/Navigasi yang memerlukan perawatan khusus
- (b) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Pada Program Pemeliharaan dan Prasarana Aparatur Terjadi Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan gedung ex kantor pengujian kendaraan bermotor.

**b. Solusi**

- (a) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara di Jawa Barat, Perlu penambahan jasa tenaga kebersihan dan pengamanan – Maintenance secara rutin dan penambahan sarana Navigasi sebagai Back up/cadangan.
- (b) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, diupayakan percepatan pekerjaan dengan menambah pekerja dan menambah waktu pekerjaan (lembur) dan akan dikenakan denda 1/1000 perhari

**12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

**13. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah**

Pada Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah dan Keuangan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat s/d Tahun 2014 (Tahun berjalan) terlampir dalam formulir J-1 (rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD).

### **2.1.1. Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja Serta Langkah Antisipatif**

Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian kinerja yang mempengaruhi program pembangunan maupun program kegiatan.

Namun kami menyadari bahwa segala upaya untuk pencapaian kinerja yang lebih baik sekecil apapun selalu mendapatkan hambatan dan pelaksanaannya tidak sesempurna sesuai dengan harapan.

Dalam pencapaian Sasaran Strategik Tahun 2014, terdapat beberapa kendala dan hambatan pada setiap kegiatan :

Dalam pencapaian Sasaran Tahun 2014, terdapat beberapa kendala dan hambatan antara lain adalah :

1. Kendala peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Banyaknya peraturan di bidang Perhubungan, baik darat, laut dan udara memerlukan kesamaan penafsiran untuk pelaksanaannya di segala tingkatan. Selain itu juga diperlukan harmonisasi peraturan perundangan bidang Perhubungan khususnya dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang kadang-kadang di lapangan menimbulkan kendala tersendiri untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah hukum di belakang hari.

Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masih akan memerlukan waktu panjang untuk menyesuaikan peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan Perhubungan di Daerah.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kualitas;

Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlah tentu memerlukan manajemen tersendiri untuk dapat menjalankan roda organisasi di Bidang/Balai/UPTD dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Selain berkurang dari sisi jumlah, kebutuhan kompetensi di Bidang Darat/Laut dan Udara juga mendesak untuk dipenuhi, mengingat ketiga moda tersebut terdapat

pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan sesuai yang ditentukan.

**3. Kendala dalam menangani pengaduan masyarakat**

Kendala yang umumnya dihadapi oleh instansi adalah keterbatasan anggaran penanganan pengaduan masyarakat dan belum adanya unit khusus yang menangani pengaduan masyarakat, sehingga tindak lanjut terhadap kasus kasus pengaduan masyarakat hanya dititipkan pada kegiatan rutin Dinas pada Sekretariat. Pengaduan dari masyarakat tersebut seringkali dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan berbagai pertanyaan yang sering kali sulit untuk dijelaskan, karena berbeda penafsiran dari sudut pandang. Hal ini memerlukan penanganan tersendiri, karena secara psikologis juga dapat mengganggu kinerja dari pelaksanaan kegiatan. Di satu sisi merupakan amanat Undang-Undang keterbukaan informasi publik, di lain pihak perbedaan sudut pandang seringkali memerlukan waktu yang panjang untuk menjelaskan. Diperlukan unit atau sub unit tersendiri yang dapat menjawab berbagai hal yang ditanyakan oleh masyarakat maupun yang dapat diinformasikan kepada masyarakat.

**4. Pembangunan Infrastruktur memerlukan biaya yang besar, hal ini juga menjadi kendala**

Biaya yang cukup besar yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur Transportasi, memerlukan jalan keluar yang sistematis dan terukur, baik secara peraturan maupun secara politik penganggaran. Pelibatan swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi tentu harus dinaungi dengan peraturan perundangan yang harmonis, transparan dan akuntabel. Karena seringkali kendala peraturan, menimbulkan kelambatan dalam pengambilan keputusan, karena melibatkan berbagai pihak, dan kekhawatiran akan menimbulkan masalah hukum di belakang hari. Sehingga diperlukan terobosan hukum untuk memecahkan masalah tersebut



Dalam tahun 2014 pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan bidang perhubungan untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, Sedangkan penanganan tugas pokok sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan lainnya belum maksimal dilaksanakan, mengingat penanganan bidang perhubungan memerlukan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta semua stakeholder. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan pada tahun tahun mendatang Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mampu melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah Provinsi dibidang perhubungan dan menjadikan dinas yang dapat mendukung dalam kerangka pembangunan daerah Jawa Barat khususnya pembangunan disektor perhubungan.

Sedangkan kendala dan hambatan yang mengemuka secara umum dalam pembangunan urusan wajib bidang Perhubungan antara lain adalah :

**1. Peningkatan Fasilitas lalu Lintas Jalan**

*a. Kendala dan Hambatan*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bahwa Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Dalam pasal 26 disebutkan bahwa Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah untuk jalan nasional;
- b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
- c. pemerintah kabupaten/kota untuk jalan
- d. kabupaten/kota dan jalan desa; atau
- e. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas merupakan serangkaian usaha dan kegiatan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Sesuai pasal 7 Perda Nomor 3 Tahun 2011 disebutkan bahwa penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi c.q. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Sejalan dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 64/255 tanggal 10 Maret 2010 tentang *Improving Global Road Safety* melalui Program *Decade of Action for Road Safety* 2011-2020 yang telah dikuatkan dengan Instruksi Presiden Republik Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Keselamatan Jalan dalam rangka penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab kita bersama.

Dalam melaksanakan Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang meliputi 5 (lima) Pilar yaitu Manajemen Keselamatan Jalan, Jalan yang Berkeselamatan, Kendaraan yang Berkeselamatan, Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan, dan Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk melaksanakan Pilar Kedua : Jalan Yang Berkeselamatan adalah dengan program Perencanaan dan Pelaksanaan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Jawa Barat yaitu dengan meningkatkan pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas jalan di Jawa Barat berupa Rambu Lalu

Lintas, Marka Jalan, Pagar Pengaman Jalan dan Panerangan Jalan Umum (PJU) serta mendorong Kabupaten/ Kota di Jawa Barat untuk memenuhi Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jalan Lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui bantuan keuangan kepada Kabupaten/ kota berupa pemenuhan fasilitas lalu lintas jalan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana fasilitas lalu lintas jalan di Jawa Barat, Seksi Rekayasa dan Keselamatan Bidang Transportasi Darat pada Tahun 2014 telah melaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat fisik yaitu pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas jalan di jalan Provinsi di Jawa Barat. Kebutuhan prasarana fasilitas lalu lintas Jalan di Jawa Barat ini terdapat pada program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

Dalam program ini, terdapat permasalahan yaitu fasilitas lalu lintas jalan yang ada dan telah terpasang masih menunjukkan kekurangan-kekurangan dari sisi kuantitas. Disisi lain fasilitas lalu lintas yang terpasang merupakan barang/benda yang sangat rentan terhadap kehilangan pencurian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang dilakukan adalah pihak Dinas Perhubungan akan mengusulkan secara bertahap kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan pada ruas jalan provinsi di Jawa Barat setiap tahunnya dan mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan untuk menyempurnakan standar teknis fasilitas lalu lintas yang mempunyai nilai ekonomis rendah sehingga mengurangi resiko terjadinya pencurian. Usaha lain adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya fasilitas perhubungan untuk meningkatkan keselamatan penggunaan jalan

Sesuai data yang ada, pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**  
**Tahun 2012-2014**

NO	Tahun	Nama Fasilitas Lalu Lintas			
		Marka (M2)	Rambu (Unit)	Guard rail (unit)	PJU (unit)
1	2012	1.405.550	3.808	20.877	214
2	2013	1.584.575	6.098	21.047	576
3	2014	1.672.575	6.685	21.207	989

Hasil pelaksanaan kegiatan diharapkan adalah meningkatnya kelancaran dan kenyamanan ber lalu lintas dengan terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan khususnya pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat, berupa pemasangan Rambu Lalu lintas Uk. 60 X 60 cm, PJU (Solar Cell dan konvensional), Pagar Pengaman Jalan, marka jalan dan Laporan Hasil Updating dan inventarisasi/kebutuhan fasilitas kelengkapan jalan, laporan updating data tingkat pelayanan jalan provinsi dan laporan updating data rawan kecelakaan lalu lintas, maka peningkatan fasilitas lalu lintas di jalan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan keselamatan para pengguna jalan dan dalam sosialisasi dan pendidikan masyarakat untuk menuju tertib lalu lintas.

Berdasarkan data sampai dengan tahun 2014, prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Barat mencapai 17,02 %.

Bila dibandingkan dengan panjang jalan baik yang berstatus Jalan Nasional, Jalan Provinsi, maupun Jalan Kabupaten/Kota, fasilitas lalu lintas jalan yang ada dan yang telah terpasang masih menunjukkan kekurangan-kekurangan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

Walaupun dari tahun ke tahun, Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota telah berupaya untuk menambah baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, namun hal tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada.

***b. Langkah Antisipatif :***

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan dan pendidikan masyarakat yang secara berkesinambungan untuk meningkatkan keselamatan penggunaan jalan, Dinas Perhubungan berupaya untuk mengusulkan kembali pada setiap tahun anggaran untuk dapat memenuhi kekurangan-kekurangan dan memelihara fasilitas lalu lintas jalan.

## **2. Sarana dan Prasarana Perkantoran**

### ***a. Kendala dan Hambatan***

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan serta untuk meningkatkan kinerja aparat Dinas, tentunya fasilitas sarana dan prasarana perkantoran menjadi suatu hal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Terdapat beberapa sarana dan prasarana perkantoran yang saat ini dirasakan belum dapat mendukung dan meningkatkan (walaupun tidak sampai pada tahapan menghambat) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Kendala tersebut berupa kekurangan fasilitas sarana perkantoran seperti perangkat pendukung kerja, prasarana di jembatan timbang, kendaraan operasional, dan lokasi prasarana jembatan timbang.

### ***b. Langkah Antisipatif***

Untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas tersebut, Dinas Perhubungan berupaya untuk mengusulkan pada tahun berikutnya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kekurangan tersebut serta tetap mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dengan melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkelanjutan. Salah satunya dengan revitalisasi UPTD/Balai dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

### **2.1.2. Strategi Pemecahan Masalah**

Dari uraian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut di atas diperlukan upaya dan strategi secara bersama untuk meningkatkan pelayanan bidang Perhubungan.

Dengan adanya kendala tersebut, maka strategi yang diterapkan dalam upaya pemecahannya adalah dengan menggunakan strategi skala prioritas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan harapan bahwa tujuan pencapaian visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai sasaran utama masih tetap dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Selain itu diperlukan strategi terobosan yang terencana dan bertahap agar tujuan akhir dari pelayanan bidang Perhubungan berupa penyelenggaraan perhubungan yang mengembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diwujudkan.

### **2.1.3. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan**

Berdasarkan pasal 3 Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Perhubungan, penyelenggaraan Perhubungan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan transportasi darat, laut dan udara yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan etika penyelenggaraan perhubungan darat, laut dan udara; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dan Sesuai Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Perhubungan, bahwa penyelenggaraan perhubungan berasaskan :

- 1) asas transparansi;
- 2) asas akuntabilitas;
- 3) asas berwawasan lingkungan hidup;
- 4) asas berkelanjutan;
- 5) asas partisipatif;
- 6) asas manfaat;
- 7) asas efisien dan efektif;
- 8) asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- 9) asas keterpaduan;
- 10) asas kemandirian;
- 11) asas keadilan;
- 12) asas kepentingan umum;
- 13) asas kedaulatan; dan
- 14) asas kebangsaan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa sesuai RPJPD perencanaan pembangunan telah memasuki periode 2013 – 2018. Berdasarkan perencanaan jangka panjang daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 berada pada tahapan untuk memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh sebagai upaya menyiapkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat dalam berbagai bidang, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain daripada itu RKPD juga merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk tahun yang sama.

Di dalam perencanaan strategis yang disusun Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu :

- 1. Tujuan dan Sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2013-2018 yang dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7  
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat  
Berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2013-2018

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang berkualitas, yang mampu mendukung pelayanan transportasi yang efisien	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan.
2	Terwujudnya pelayanan transportasi laut dan ASDP yang handal	Terwujudnya pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut regional, antara lain melalui pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya di Kabupaten Karawang, pengembangan Pelabuhan Cirebon sebagai pintu gerbang ekspor dan perdagangan Jawa Barat Bagian Timur, pembangunan Pelabuhan Muara Gembong di Kabupaten Bekasi, mendorong pembangunan pelabuhan pengumpan regional di Jawa Barat, serta pengembangan pelabuhan laut regional Jawa Barat bagian Selatan, serta pelabuhan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah



No	Tujuan	Sasaran
3	Terwujudnya pelayanan transportasi darat yang efisien	<p>Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ (menuju zero accident) melalui peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi dan pengembangan Informasi teknologi untuk mengatasi persoalan lalu lintas jalan</p> <p>Mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman</p> <p>Terlaksananya pengembangan angkutan massal antara lain mewujudkan pembangunan shortcut Cibungur Tanjung Rasa monorel di Kawasan Metropolitan Bandung, mendorong pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung-Kertajati – Cirebon, pembangunan jalur KA Tanjungsari-Sumedang-Kertajati-Kadipaten, pembangunan jalur KA Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang, reaktivasi jalur KA Bandung-Tanjungsari, Kadipaten-Cirebon, Bandung-Ciwidey, Banjar-Pangandaran, Garut-Cikajang, pembangunan KRL (kereta listrik) pada jalur Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka, elektrifikasi rel ganda KA antar kota Cikarang-Cikampek, pembangunan jalur ganda KA dan KRL jalur Kiaracondong-Rancaekek dan Rancaekek-Cicalengka, rel ganda parsial jalur KA Cisomang-Cikadondong, rel ganda KA Perkotaan Manggarai-Cikarang (lintas Manggarai-Jatinegara-Bekasi), rel ganda KA Perkotaan Parung Panjang-Tenjo, rel ganda parsial Purwakarta-Ciganea, mengembangkan jalur-jalur baru kereta api serta optimalisasi jalur yang telah ada, Reaktivasi jalur kereta api yang sudah tidak beroperasi; pembangunan jalur kereta api khusus barang/ kargo; serta jalur KA dan sarana transportasi massal strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah</p>
4	Terwujudnya pelayanan transportasi udara yang terintegrasi dan mampu menjangkau wilayah lebih jauh.	<p>Terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa Barat, antara lain melalui dukungan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity, Pangkalan Udara Citarate di Kabupaten Sukabumi, pengembangan Bandara Pusat Penyebaran Sekunder Husein Sastranegara, Bandara Pusat Penyebaran Tersier Cakrabhuwana di Cirebon, Pangkalan Udara Atang Sanjaya di Kabupaten Bogor, Pangkalan Udara Kaliati di Kabupaten Subang, Pangkalan Udara Cibeureum di Kabupaten Tasik, Pangkalan Udara Wiriadinata di Kota Tasikmalaya, Bandara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran; serta Bandara strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.</p>
5	Terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian transportasi yang akuntabel	<p>Meningkatkan penanganan dan pengendalian muatan lebih (overloading)</p> <p>a. Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi karoseri; b.Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor</p>



Tabel 2.8.  
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat  
Berdasarkan Hasil Review Menpan

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi	Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum
2	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan jalan	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum
3	Meningkatkan penyediaan prasarana transportasi di Jawa Barat	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi
4	Meningkatnya Ketersediaan perlengkapan Jalan	Meningkatnya Ketersediaan perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menyusun strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 khususnya di bidang transportasi dan perhubungan dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada.

Pada dasarnya, sistem transportasi dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu *supply* (sarana prasarana), *demand* (permintaan atau kebutuhan akan sarana prasarana), pola pergerakan, dan kebijakan atau regulasi. Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan membentuk suatu sistem transportasi.

Keempat komponen transportasi bisa saling mempengaruhi secara positif atau negatif antara satu dengan yang lainnya. Permintaan yang berlebihan, misalnya pesatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya perkembangan guna lahan di suatu daerah. Jika tidak disertai dengan pemenuhan akan sarana prasarana transportasi berupa ketersediaan angkutan umum, jaringan jalan, dan terminal akan sangat mempengaruhi pola pergerakan di daerah tersebut. Untuk itu diperlukan intervensi kebijakan dan perencanaan yang tepat untuk mengatasi kesenjangan antara *demand* dan *supply*. Kekeliruan pengambilan kebijakan atau perencanaan untuk mengatasi persoalan dengan sendirinya akan menimbulkan persoalan-persoalan lain yang semakin kompleks yang bisa berdampak pada aspek sosial, politik dan ekonomi. Salah satu isu nasional yang mengemuka karena persoalan sistem transportasi adalah

dan *supply*. Kekeliruan pengambilan kebijakan atau perencanaan untuk mengatasi persoalan dengan sendirinya akan menimbulkan persoalan-persoalan lain yang semakin kompleks yang bisa berdampak pada aspek sosial, politik dan ekonomi. Salah satu isu nasional yang mengemuka karena persoalan sistem transportasi adalah Buruknya transportasi perkotaan menyebabkan kota-kota di Indonesia tidak efisien, memiliki kondisi lingkungan udara yang tidak sehat, kehilangan daya saing dan tidak mampu mendorong investasi dan pertumbuhan.

Menyadari betapa rentannya sistem transportasi dan kompleksitas persoalan yang dapat terjadi, Dinas perhubungan Jawa Barat mencoba merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi persoalan sistem transportasi di Jawa Barat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rumusan pernyataan Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun mendatang yang diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Menurut RPJMD Tahun 2013-2018, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat perlu melaksanakan strategi yaitu Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta pengembangan sistem transportasi publik regional yang nyaman dengan menerapkan kebijakan Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan.

#### **2.1.4. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan**

Dari rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang telah disusun, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional pada kurun waktu 2013-2018. Langkah-langkah strategis tersebut meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari program tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018. Program Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9.  
Program Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

29	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bidang Perencanaan Pembangunan
49	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Bidang Perhubungan
50	Program Rehabilitas Dan Pemel Prasarana Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Bidang Perhubungan
51	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Bidang Perhubungan
52.	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Bidang Perhubungan
53	Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor	Bidang Perhubungan
57	Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
59	Program Pembinaan, Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Aparatur	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
60	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
61	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
62	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
66	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
75	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Bidang Statistik

Pada dasarnya, tiga belas program tersebut disusun sebagai acuan bagi penyusunan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang yang ada di lingkup Dinas Perhubungan Jawa Barat pada periode 2013-2018. Pencapaian masing-masing program tersebut akan diukur berdasarkan indikator keluaran. Adapun kegiatan dari masing-masing program tersebut yang dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang diuraikan sebagai berikut:

## A. Sekretariat

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat adalah sebagai berikut:

25		Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
25	01	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah
25	02	Verifikasi Kegiatan Bantuan Keuangan, Hibah, Bansos Bidang Perhubungan
50		Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
50	34	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Perda No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan
52		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
52	35	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
53		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
53	36	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
54		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
54	41	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
55		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
55	51	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
59		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
59	52	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
67		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
67	53	Peningkatan sistem data dan informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

## B. Bidang Transportasi Darat

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Transportasi Darat adalah sebagai berikut:

25		Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
25	57	Penyusunan Rencana Kerja Bidang Transportasi Untuk Persiapan PON XIX
41		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
41	04	Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
41	18	FS Terminal Terpadu di Jawa Barat
42		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
42	20	Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat
42	21	Pengembangan Fasilitas LLJ di Jawa Barat
42	22	Pendamping Untuk Kegiatan DAK Fasilitas Lalu Lintas
42	23	Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan
43		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
43	24	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba Tertib Lalu Lintas
43	25	Evaluasi Tingkat Pelayanan Angkutan Penumpang Umum AKDP dan AKAP di Jawa Barat
43	26	Evaluasi Tingkat Pelayanan Jalan Provinsi di Perkotaan
43	27	Operasional Bus Sekolah